

Sengketa Atas Penerbitan Hak Pakai Di Atas Bekas Tanah Partikelir (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 315 K/Pdt/2019) = Dispute Over The Issuance Of Use Rights On Former Land Private (Based On The Decision Of Indonesian Supreme Court Case Number 315 K/Pdt/2019)

Yohanes Aditya H.P, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920557419&lokasi=lokal>

Abstrak

Penghapusan bekas tanah partikelir seharusnya telah selesai setelah dikeluarkannya Undang-Undang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir dan Undang-Undang Pokok Agraria dikarenakan sifat-sifatnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Permasalahan yang dibahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa atas tanah partikelir yang telah dihapus berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir dan dinamika kebijakan penghapusan tanah partikelir pada Undang-Undang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir berdasarkan Putusan Perkara Nomor 315K/Pdt/2019. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dianalisis secara kualitatif untuk mendapat hasil penelitian menjelaskan adanya penghapusan tanah partikelir sampai sekarang belum selesai dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa atas tanah partikelir salah satunya mengenai penyalahgunaan wewenang Lurah yang mengeluarkan bukti penguasaan (girik) atas bekas tanah Partikelir. Dinamika kebijakan penghapusan tanah partikelir menjelaskan keberadaan tanah partikelir sebelum dan setelah Undang-Undang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir serta permasalahan hukum sengketa tanah partikelir berdasarkan Putusan Perkara Nomor 315K/Pdt/2019.

.....The elimination of former private land should have been completed after the issuance of the Law on the Elimination of Particular Lands and the Basic Agrarian Law due to its characteristics that are not in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. which have been removed based on the Law on the Elimination of Particular Lands and the dynamics of the policy on removing private lands in the Law on the Elimination of Particular Soils based on Decision on Case Number 315K / Pdt / 2019. This thesis, using normative legal research methods is analyzed qualitatively to obtain research results explaining that the elimination of private land has not yet been completed due to factors causing disputes over private land, one of which is the abuse of authority of the village head who issues evidence of control (girik) over the former. Particle soil. The dynamics of the policy of removing private land explains the existence of private land before and after the Law on the Abolition of Particular Lands as well as legal issues for private land disputes based on Decision on Case Number 315K / Pdt / 2019.</p>